



Media Title	Investor Daily		
Head Line	PPJT 6 Ruas Tol Tunggu Finalisasi Pembiayaan		
Date	10 Maret 2014	Color	
Section	News	Circulation	
Page No	6	Article Size	
Journalist	ean	Advalue	
Frequency	Daily	PR Value	

PPJT 6 Ruas Tol Tunggu Finalisasi Pembiayaan

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum menyatakan perjanjian pengusahaan jalan tol tol (PPJT) proyek enam ruas tol dalam kota Jakarta masih menunggu finalisasi pembiayaan antara PT Jakarta Tollroad Development (JTD) dan perbankan. Hal ini dikarenakan besarnya nilai investasi yang diperlukan untuk membiayai proyek tersebut, yakni mencapai Rp 41 triliun.

“Antara badan usaha jalan tol dan perbankan masih ada yang perlu dirundingkan, karena ada persyaratan yang harus dipenuhi. Begitu persyaratannya sudah siap, bisa diteken PPJT-nya. Kami harapkan PPJT ini bisa ditandatangani pada bulan ini,” kata Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto di Jakarta, akhir pekan lalu.

Menurut Djoko, pembangunan proyek tersebut sudah tidak ada permasalahan lagi. Jikapun ada, itu kemungkinan dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, seperti menunggu persetujuan hasil analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) proyek itu. “Tapi, itu juga sudah selesai dan sekarang tidak ada masalah,” tutur dia.

Di tempat yang sama, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Achmad Gani Ghazali menambahkan, saat ini masih difinalisasi mengenai pinjaman dari perbankan. Ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh PT JTD agar bisa membangun proyek tersebut.

“Investasi tol ini *kan* cukup besar, hingga Rp 41 triliun. Ini yang masih dirundingkan, sehingga perlu ada penahapan dalam pengucuran kreditnya yang mencapai 70% dari perbankan. Jika ini sudah selesai, mereka akan melaporkan kepada BPJT dan bisa segera

diteken PPJT-nya pada bulan ini bila tidak ada lagi kendala,” jelas Gani.

Proyek enam ruas tol ini direncanakan dibangun bertahap. Pada tahap pertama, akan dibangun ruas tol Semanan-Sunter dan Sunter Pulogebang. Kemudian, proyek akan dilanjutkan untuk empat ruas tol lainnya.

Proyek enam ruas tol dalam kota Jakarta ini merupakan usulan dari JTD yang didukung oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan disampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Setelah disetujui, jalan tol ini masuk dalam jaringan jalan nasional.

Terkait adanya usulan pembangunan jalan tol Bandung-Rajapolah oleh Badan Penanaman Modal Daerah Jawa Barat, Djoko menuturkan, proyek tol itu belum diusulkan kepada Kementerian Pekerjaan Umum. “Hingga saat ini belum ada jalan tol yang diusulkan oleh pemerintah daerah,” ujar dia.

Djoko melanjutkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga perlu mengusulkan pembangunan jalan tol Bandung-Rajapolah kepada Kementerian Pekerjaan Umum bila ingin melanjutkan proyek itu masuk dalam jaringan jalan nasional. “Harusnya yang mengusulkan badan usaha yang didukung pemda kepada kami. Ini merupakan *unsolicited*,” kata dia.

Saat proyek itu diusulkan, sambung dia, harus memenuhi persyaratan yang sudah diatur dalam Peraturan Presiden No 67/2005 tentang Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha untuk Penyediaan Infrastruktur. Persyaratan itu antara lain sudah ada mengenai hasil studi kelayakan, desain proyek, dan Amdal. (ean/c04)